



**PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK
KELAS 1A**

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

2024

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

 Telepon
(0561) 734100

 Website
www.pn-pontianak.go.id

 Alamat
Jln. Sultan Abdurrahman No. 89

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah pedoman dalam menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahun 2024 dapat selesai dengan baik tidak terlepas dari kerjasama semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun Anggaran 2024 ini, untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangan pemikiran dan tenaga sehingga Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dapat disusun.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat kami harapkan sebagai penyempurnaan penyusunan RKT di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kinerja Tahunan ini dapat menjadi tolak ukur serta acuan bagi kita semua terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024. Semoga semua langkah dan upaya kita selalu mendapat bimbingan dan Ridho dari Allah SWT.

Pontianak, 2 Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

AKHMAD ELIARSYAH JOKO SUTRISNO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB II.....	3
RENCANA KINERJA TAHUNAN	3
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024	4
BAB III.....	13
PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, perencanaan kinerja menjadi kunci utama yang harus menjadi perhatian dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaanrenstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi melalui kegiatan tahunan. Penyusunan dokumen dilakukan selaras dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Tambahan, dan target yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan.

Dalam SAKIP terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Capaian Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah salah satu sub komponen yang harus ada dari komponen Perencanaan Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

RKT Tahun 2024 ini merupakan bagian dari rencana implementasi program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dengan harapan semua kegiatan

menjadi terarah dan terukur untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Instansi. Penyusunan RKT Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Penyusunan RKT Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2024 adalah memberikan gambaran langkah – langkah atas program dan kegiatan yang menjadi target kinerja di tahun 2024, dengan harapan dapat memberikan informasi rencana kinerja yang terukur kepada pemberi mandat maupun unit atas kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA di tahun 2024.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program utama adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi / keselarasan mulai dari RPJMN, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan penetapan Kinerja (PK).

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT adalah :

1. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang bersangkutan;
2. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa output / keluaran maupun outcome / hasil;
3. Indikator kinerja *output* / keluaran adalah sesuatu berupa produk / jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
4. Indikator *outcome* / hasil adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah sebagaimana tergambar pada matriks berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024
NO. 599/KPN.WI 7-U I/OT 1.6/I/2024
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92%
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%
3.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	92%
4.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	83%
7.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%
8.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
9.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100%
12.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
13.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100%
14.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
18.	Meningkatnya terhadap Pengadilan	Kepatuhan Putusan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%
19.		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%
20.	Terlaksananya Administrasi dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi	Pembinaan dan Kepegawaian Presentase Pelaksanaan Urusan yang tertib	97%
21.		Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	97%
22.		Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	100%
23.		Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	97%
24.		Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	97%
25.		Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	98%
26.	Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	98%
27.		Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	80%

Tabel 1 Target Kinerja PN Pontianak Kelas 1A Tahun 2024

**TARGET KINERJA DAN PENDANAAN RENCANA KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KET	
			2020	2021	2022	2023	2024								
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	92%	92%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	1000	Perkara	Rp. 13,792,326,000	
		b.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	92%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu	40	Perkara	Rp. 53.960.000	
		c.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	92%	92%		Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	889	Perkara	Rp. 295.000.000	
		d.	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	92%	90%		Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	64	Perkara	Rp. 60.000.000	
								Percepatan Penyelesaian Perkara					Rp. 20.000.000		

	e.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	80%	80%	83%	83%		Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding	40	Perkara	Rp. 3.450.000	
	f.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	80%	80%	83%	83%		Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang mengajukan upaya Hukum Kasasi dan PK	25	Perkara	Rp. 2.950.000	
	g.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%		Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	889	Perkara	Rp. 295.000.000	
	h.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%	80%	80%	85%	85%		Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Survei Layanan Peradilan	90	Sangat Baik	Rp. 13,792,326,000	
								Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 472,960,000					
	i.	Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekatan Keadilan Restotatif	-	-	1%	1%	1%		Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekatan Keadilan Restotatif	1	Perkara	Rp. 295.000.000	

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%	90%	90%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Jumlah Salinan putusan Perdata yang dikirim tepat waktu	1000	Perkara	Rp. 13,792,326,000	
		b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	-	-	90%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Salinan putusan Perdata Khusus yang dikirim tepat waktu	40	Perkara	Rp. 53.960.000	
		c.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90%	90%	90%	100%	100%		Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Salinan putusan Pidana yang dikirim tepat waktu	889	Perkara	Rp. 295.000.000	
		d.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para	-	-	90%	100%	100%		Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Salinan putusan Pidana Khusus yang dikirim tepat waktu	64	Perkara	Rp. 60.000.000	
								Percepatan Penyelesaian Perkara					Rp. 20.000.000		

			Pihak Tepat Waktu												
		e.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	10%	7%	5%	5%		Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi	50	Perkara	Rp. 13,792,326,000	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	100%	0%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan	-	Perkara	-	
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	100%	0%		Sidang di luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	-	Perkara	-	
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	90%	90%	100%	100%		Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Jumlah layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	137	Orang	Rp. 44.000.000	
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak	60%	60%	60%	40%	40%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	5	Perkara	Rp. 53.960.000	

			lanjuti (Dieksekusi)						di Wilayah Tengah					
		b.	Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	60%	60%	40%	40%		Jumlah putusan perkara perdata khusus yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	5	Perkara		
5.	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a.	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	-	-	-	97%	97%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	Rp. 13,792,326,000	
		b.	Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	-	-	-	97%	97%						
		c.	Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	-	-	-	100%	100%						

		d.	Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	-	-	-	97%	97%						
		e.	Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	-	-	-	97%	97%						
		f.	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	-	-	-	98%	98%						
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	a.	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan	-	-	-	98%	98%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		Rp. 472,960,000	

		Manajemen Peradilan Umum											
	b.	Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	-	-	-	80%	80%						

Keterangan :

 = target tahun berjalan

Pontianak, 2 Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

AKHMAD FIJARSYAH JOKO SUTRISNO

BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan mediasi untuk menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional sehingga dapat membantu pencapaian pelaksanaan program. Dan juga dapat menjadi suatu *performance agreement* sehingga memudahkan proses pengukuran kinerja, dapat membantu untuk monitoring dan mengevaluasi kegiatan, serta dapat membantu menetapkan rencana kinerja periode berikutnya.



SCAN ME


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A

 Jln. Sultan Abdurrahman No. 89, Pontianak

 (0561) 734 100, FAX (0561) 763 214, 763 196

 pengadilannegeriptk@gmail.com

 0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)

 0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)